

L
A
K
I
P

T
A
H
U
N

2
0
2
2

**LAPORAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PELAIHARI
2023**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	1
C. Isu Strategis	11
D. Produk dan Layanan	13
E. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. Visi RPJMD	16
B. Misi RPJMD	16
C. Tujuan	17
D. Sasaran Strategis	17
E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)	18
F. Indikator Kinerja Utama	19
G. Perjanjina Kinrja	20
H. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	27
1. Sasaran RPJMD	27
2. Eselon II	29
3. Eselon III Sekretaris	32
3.1 Eselon IV (Kasubag Perencanaan)	33
3.2 Eselon IV (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	34
3.3 Eselon IV (Kasubag Keuangan)	37
4. Eselon III (Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan)	37
5. Eselon III (Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan)	49
6. Eselon III (Kabid Pengembangan Usaha Perikanan)	70
7. Eselon III (Kabid Perikanan Tangkap)	86
B. Akuntabilitas Keuangan	93
BAB IV PENUTUP	99
A. Simpulan	99

B. Strategi Peningkatan Kinerja	100
---------------------------------------	-----

LAMPIRAN

Lampiran 1.....	102
-----------------	-----

Lampiran 2	103
------------------	-----

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah – Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun.

Laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian sasaran Strategis dengan beberapa kendala, serta langkah perubahan kedepan.

Berbagai capaian sasaran strategis tercermin dalam analisis sasaran dan analisis capaian indikator kinerja utama (IKU) serta komponennya.

Capaian kinerja diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2022

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh aparat yang telah memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kritik dan saran senantiasa lkami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya dan semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat serta informasi dalam mewujudkan good governance dan clean governance

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas,



MAD TAUFIK, S.Pd. MAP

NIP 19710224 199702 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maksud dan tujuan dari penyusunan Lapkin Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebagai laporan dari semua kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai target dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023, baik kegiatan administrasi yang bersifat rutinitas maupun kegiatan pembangunan sektor komoditi pangan dan perikanan.

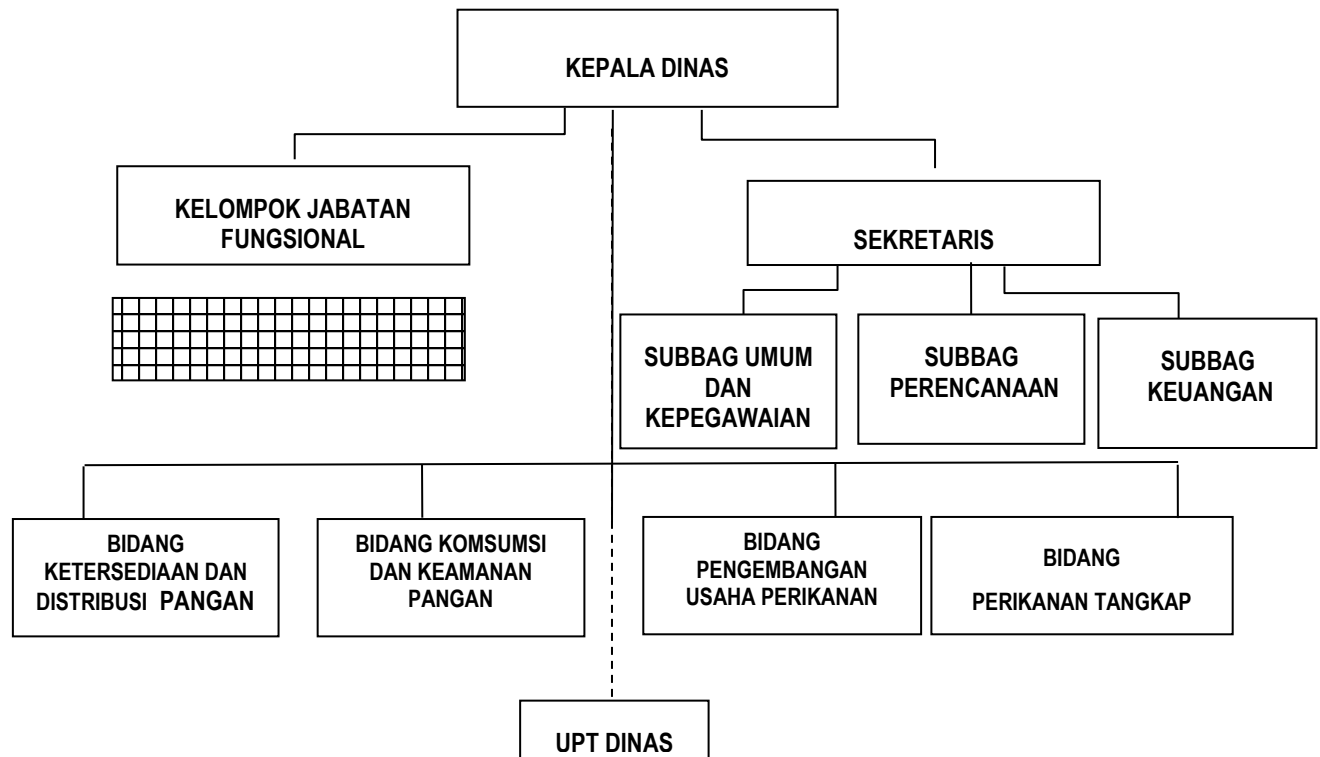
Untuk meningkatkan peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, handal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi dan berperan serta dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Laporan kinerja dibuat dalam rangka wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka upaya pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang terukur secara periodik dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara bertahap dalam pencapaian visi dan misi selama lima tahun kedepan.

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Dengan dikeluarkannya Perda No. 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka bagan struktur organisasi dan tata kerja serta uraian tugas bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**



Adapaun Uraian Tugas Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Uraian Tugas :

1. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
6. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan (TPI);
7. pemberdayaa usaha kecil pembudidayaan ikan;

8. pengelolaan pembudidayaan ikan;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
10. pelaksanaan administrasi dinas;
11. pembinaan UPT Dinas; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan

penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dari:

1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan administrasi keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan kepegawaian

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;

- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- 1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

1. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Usaha Perikanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pengembangan usaha perikanan;
 - b. perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha perikanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengembangan usaha perikanan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan usaha perikanan;
 - e. pelaksanaan kebijakan perikanan budidaya;
 - f. pelaksanaan kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha perikanan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Perikanan Tangkap

1. Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perikanan tangkap;
 - b. perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perikanan tangkap;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan kebijakan kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan;
 - f. pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana penangkapan;
 - g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya Manusia

Dengan melaksanakan urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan didukung oleh 27 personil dengan latar belakang beragam tingkat pendidikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongan. Kondisi kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut hingga Desember 2022 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan formal

No	PENDIDIKAN	STATUS		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1.	S2	3	0	3	11,11%
2.	S1	15	1	16	55.55%
3.	D-3	2	0	2	7,40%
4.	SLTA	6	0	6	25,94%
5.	SLTP	0	0	0	0%
6.	SD	0	0	0	0%
Jumlah		26	1	27	100%

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didalam

menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar bidang dengan tingkat pendidikan setingkat, pendidikan terdiri dari : SLTA sebesar 25,94%, D-3 sebesar 7,40%, S-1 sebesar 55,55%, S-2 sebesar 11,11%

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Golongan

NO	GOLONGAN	STATUS		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1	2	3	4	5	6
1	GOL I	0	0	0	0%
2	GOL II	4	0	4	14.83%
3	GOL III	17	1	18	66.66%
4	GOL IV	5	0	5	18,51%

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Tabel. 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Jabatan/Eselonoring

No.	Eselon	Jumlah
1	2	3
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	3
4.	Non Eselon	18

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

D. Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan kinerja, tantangan dan peluang Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

Permasalahan terkait dengan Ketahanan Pangan Belum optimalnya

- 1) Sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan ,
- 2) Cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),
- 3) Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,
- 4) Sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya
- 5) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan
- 6) Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Permasalahan terkait Perikanan

a. Pengembangan Usaha Perikanan

- 1) Belum sepenuhnya petani pembudidaya menguasai dan menerapkan cara berbudidaya ikan yang baik (CBIB)
- 2) Rendahnya kualitas/ mutu benih ikan
- 3) Menurunnya daya dukung lahan tambak
- 4) Saluran tambak mengalami pendangkalan
- 5) Adanya pencemaran air tambak
- 6) Hilangnya tambak akibat abrasi dan rob
- 7) Kurangnya sarana dan prasarana budidaya perikanan
- 8) Tingginya harga pakan ikan tidak sebanding dengan kenaikan nilai produksi
- 9) Kapasitas SDM pembudidaya belum optimal
- 10) Kurangnya akses permodalan
- 11) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengolah dan pemasaran dalam hal inovasi produk
- 12) Produk olahan perikanan di masyarakat masih rendah
- 13) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
- 14) Masih banyak pengolah hasil perikanan yang kurang higienis dan masih menggunakan bahan-bahan ADITIF (pengenyal, pengawet, pewarna)
- 15) Kurangnya akses pemasaran dan promosi produk hasil perikanan
- 16) Kurangnya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
- 17) Kurangnya permodalan dan Kurangnya kesadaran para pelaku usaha/

pengolah untuk memproses perijinan usaha pengolahan

b. Permasalahan terkait Perikanan Tangkap

- 1) Kurang optimalnya fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- 2) Sedimentasi di alur pelayaran (pendangkalan muara sungai sehingga kapal kesulitan masuk TPI)
- 3) Masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan
- 4) Pemanfaatan dan penangkapan ikan di perairan umum belum optimal
- 5) Lemahnya pengawasan dan pengendalian aktifitas penangkapan ikan
- 6) Nelayan tidak mempunyai penghasilan lain di musim paceklik
- 7) Kurangnya sarana prasarana penangkapan.
- 8) Kurangnya informasi, pengetahuan, keterampilan dan pemanfaatan teknologi oleh Nelayan
- 9) Kurangnya akses permodalan

E. Produk dan Layanan

Pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

- a. Pemberian Rekomendasi Pembuatan Izin Kapal Perikanan dan Pengiriman Hasil Olahan
- b. Pemungutan Sewa Beli dan Sewa Pakai Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan
- c. Menyiapkan Persediaan Gabah untuk Penanggulangan Bencana
- d. Penyedia alat tangkap ramah lingkungan
- e. Penyedia bibit ikan dan pakan ikan sesuai standar
- f. Survei harga pangan di pasar
- g. Stabilitas harga pangan masyarakat

F. Sistematika Penyajian

LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Renstra
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II (Kepala DKPP)
 - 3. Eselon III Sekretaris
 - 3.1 Eselon IV Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 3.2 Eselon IV Kasubag Perencanaan
 - 3.3 Eselon IV Kasubag Keuangan
 - 4. Eselon III Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - 5. Eselon III Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - 6. Eselon III Kabid Perikanan Tangkap
 - 7. Eselon III Kabid Pengembangan Usaha Perikanan
- B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022
 - 2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

BAB IV PENUTUP

- a. Simpulan

b. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Capaian Kinerja Renstra (2018-2023)
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

***“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI
(BERkarya, INovasi, TERTata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”***

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan Ketahanan Pangan dan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergisan dan perjalanan sektor Ketahanan Pangan dan perikanan menuju kondisi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari perekonomian Kabupaten Tanah Laut, visi sektor Ketahanan Pangan dan perikanan selayaknya dapat menjadi penggenap visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Tanah Laut dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Untuk tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut ada pada MISI Ketiga dan kelima yakni Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Secara lebih detail, keterkaitan Misi Ketiga dan Kelima dengan Tujuan dan Sasarannya adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Selain Visi dan Misi sebagaimana telah dijelaskan diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut juga mempunyai tujuan yang ingin diraih/ diwujudkan.

Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Secara Berkelanjutan
2. Meningkatnya produksi perikanan
3. Terwujudnya peningkatan tatakelola administrasi perkantoran

Indikator Tujuan Sebagai Berikut :

1. Persentase Ketersediaan pangan Masyarakat
2. Persentase produksi perikanan
3. Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran

b. Sasaran

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
3. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
5. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
7. Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perencanaan Dan Pelaporan

8. Meningkatkan Kelancaran Operasional Administrasi Umum Dan Kepegawaian

Indikator Sasaran sebagai berikut

1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat
2. Persentase konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
3. Persentase produksi perikanan tangkap perairan laut dan Perairan Umum
4. Persentase produksi perikanan budidaya air tawar
5. Persentase produksi perikanan budidaya air payau
6. Persentase produksi olahan hasil perikanan
7. Nilai sakin dinas ketahanan pangan dan perikanan
8. persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan
9. persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian

Tabel (Tujuan,Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan	Persentase ketersediaan pangan Masyarakat	114 % Surplus	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase peningkatan ketersediaan pangan masyarakat	114 % Surplus	114 % Surplus	114 % Surplus	114 % Surplus	114 % Surplus
				Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Persentase konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
2.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase produksi perikanan Tangkap	2,5%	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap perairan laut dan perairan umum	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

		Persentase produksi perikanan Budidaya	2,5%	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya air tawar	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
					Persentase produksi perikanan budidaya air payau	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
				Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase produksi olahan hasil perikanan	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
3.	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Persentase tata kelola administrasi perkantoran	100%	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	kenaikan nilai sakin dinas ketahanan pangan dan perikanan	B	B	B	B	B
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perencanaan Dan Pelaporan	persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Meningkatkan Kelancaran Operasional Administrasi Umum Dan Kepegawaian	persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

D. Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / formula	Penanggung jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun } n - 1} \times 100$	Bidang Pangan
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n - 1} \times 100$	Bidang Perikanan tangkap dan budidaya
			$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - 1} \times 100$	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan :

No	Eselon	sasaran strategis sesuai renstra	Uraian Indikator	Target
1	II	Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat	Persentase peningkatan ketersediaan pangan masyarakat	1%
	II	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	2.5%
2	III	Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat	Persentase peningkatan ketersediaan pangan masyarakat	114 % Sulprus
	III	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Persentase konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	93 %
	III	meningkatkan produksi perikanan tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap perairan laut	2.5%
			Persentase produksi perikanan tangkap perairan umum	2.5%
	III	meningkatkan produksi perikanan budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya air tawar	2.5%
			Persentase produksi perikanan budidaya air payau	2.5%
	III	meningkatkan produksi olahan hasil perikanan	jumlah produksi olahan hasil perikanan	2.5 %
	III	meningkatkan kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	Nilai sakip SKPD	71

	III	meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian	persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian	100%
	III	meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan	100%
3	IV	menyusun data kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dilayani secara tertib	100%
I	IV	Mengadakan saran dan prasarana Kantor	Jumlah dokumen sekretariat yang terkait sarana dan prasarana	100%
I	IV	menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja dinas ketahanan pangan dan perikanan	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1Dok
I			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun
	IV	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan pemerintah daerah	1 Dok

F. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. **Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**
- a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur
 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
3. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**
- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

- b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita per Tahun
- 4. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**
 - a. Kegiatan Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penangan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota
- 5. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota
- 6. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**
 - a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikn Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
- b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
 - Penyediaan Prasaranan Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

8. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- a. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota

9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Penyediaan data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pda Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun, pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2018-2023, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan harmoni

1.1 Tujuan

Tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 disusun adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah lima tahun ke depan;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Renstra OPD periode 2018-2023;
3. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan lima tahun ke depan;
4. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah laut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018-2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing OPD tahun 2018-2023;
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023;

6. Menetapkan indikator kinerja daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023;
7. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2018-2023;
8. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
9. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
10. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut;
11. Menjadi pedoman DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.2 Visi RPJMD

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

***“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI
(BERkarya, INovasi, TERTata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”***

1.3 Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;

2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan Ketahanan Pangan dan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergisan dan perjalanan sektor Ketahanan Pangan dan perikanan menuju kondisi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari perekonomian Kabupaten Tanah Laut, visi sektor Ketahanan Pangan dan perikanan selayaknya dapat menjadi penggenap visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Tanah Laut dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Untuk tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut ada pada MISI Ketiga dan kelima yakni Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Eselon II

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi

pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Permen/PAN/05/2007.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, fungsi organisasi tersebut.

Adapun untuk memulai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada.

Capaian indikator kinerja utama diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi sejauhmana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama mencerminkan outcome dari program –program utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan memberikan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan perkembangan dinamika masyarakat, Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan 2 indikator kinerja dan 10 sasaran strategis.

Indikator kinerja utama sesuai peraturan Permanpan dan Reformasi Bikrokrasi merupakan acuan atau kerangka kerja Pemerintah Daerah Khususnya dalam pecapaian target kinerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2022, yang benar-benar terukur yang harus dilaksanakan oleh SKPD sesuai Renstra untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / formula	Penanggung jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun } n - 1} \times 100$	Bidang Pangan
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n - 1} \times 100$	Bidang Perikanan tangkap dan budidaya
			$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - 1} \times 100$	

Target dan Capaian IKU

No	Uraian Indikator	Satuan	2021		2022		(%)	Ket.
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ton	43.419 Ton 114 % Surplus	133.196	37.341,7 Ton (114%)	92.025,5	-30,9	Penurunan persentase surplus ketersediaan pangan dari tahun 2021 (berdasarkan ASEM)
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	56.708	64.545,1	58.970	65.031	114	Perikanan Tangkap
		Ton	1.162	1.384,39	1.162	1.384,39	119	Perikanan Budidaya

Sasaran eselon II : Meningkatkan Ketersediaan Pangan Masyarakat.

Indikator :

1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat.

2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

Pencapaian indikator sesuai dengan tabel datas pada tahun 2021 target Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat adalah 133.196 Ton, 114% Surplus dan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan adalah 65.929,49 Ton, serta untuk mencapai indikator tersebut didukung dengan jumlah program sebanyak 8 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.035.882.082,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 27 orang, eselon III sebanyak 5 orang, eselon IV sebanyak 11 orang staf sebanyak 11 orang, serta PTT sebanyak 14 orang.

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat terealisasi sebesar 92.025,5 Ton, surplus 114% (adanya serangan hama tungro) dan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan adalah 66.415,39 Ton, serta untuk mencapai indikator tersebut didukung dengan jumlah program sebanyak 8 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.530.421.310,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 26 orang, eselon III sebanyak 5 orang, eselon IV sebanyak 3 orang staf sebanyak 18 orang, serta PTT sebanyak 14 orang.

Jika dilihat realisasi indikator pada tahun 2022 mengalami penurunan pencapaian berbanding dengan realisasi tahun 2021, disebabkan oleh adanya serangan hama tungro, tetapi dapat dikatakan tetap mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar 114%. Adapun perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan capaian akhir pada renstra adalah tetap tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 114%.

Kendala – kendala dalam mencapai indikator tersebut adalah :

1. Adanya serangan hama tungro pada beberapa Kecamatan Sentra Produksi;
2. Faktor cuaca ekstrem yang melanda Kalimantan Selatan;
3. Belum optimalnya pengawasan illegal fishing;
4. Belum optimalnya peningkatan mutu dan kualitas produksi perikanan budidaya.

Solusi :

1. Lebih intens dalam pendampingan penanggulangan wabah hama;
2. Lebih banyak melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam pengawasan illegal fishing;
3. Lebih intens dalam pemberian pendampingan dan audit CBIB untuk kegiatan pembesaran dan CPIB untuk kegiatan pembenihan;

Rencana Aksi :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi terjadinya wabah hama;
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan illegal fishing.

3. Eselon III (Sekretaris)

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota SKPD dengan beberapa kegiatan anata lain ;

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.884.618,00	100	825.618,00	88,01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	100	3.970.000,00	99,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.357.663.716,00	100	4.575.674.474,00	85,40
Administrasi Umum Perangkat Daerah				

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.357.793,00	100	4.831.000,00	90,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.152.233,00	100	44.992.869,00	81,58
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.758.970,00	100	7.408.902,00	84,59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.345.000,00	100	135.894.748,00	99,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.733.180,00	60	21.274.704,00	44,57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.466.800,00	100	412.640.592,00	99,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60	24.320.877,00	40,53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	60	4.400.000,00	55,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.816.000,00	100	19.808.109,00	79,82

Dari tabel diatas anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. **6.695.905.664,-** dengan realisasi sebesar Rp. **4.811.006.621,-** dengan persentase keuangan sebesar 65,04 % dengan realisasi fisik 92,19 %.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu kenaikan nilai sakiip dinas ketahanan pangan dan perikanan.

Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan	Persentase kegiatan			100 %	100 %

perencanaan dan pelaporan	perencanaan dan pelaporan.				
---------------------------	----------------------------	--	--	--	--

3.1 Eselon IV (Kassubag Perencanaan)

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan beberapa Sub Kegiatan, anggaran sebesar Rp. 90.158.636,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.666.076,- dengan persentase keuangan sebesar 54,58 % dengan realisasi fisik 94,29 %. Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran diatas, Kasubbag. Perencanaan dibantu oleh 1 (satu) orang ASN dan 1 (satu) orang PTT.

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.884.618,00	100	825.618,00	88,01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	100	3.970.000,00	99,24

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu kenaikan nilai sapik dinas ketahanan pangan dan perikanan.

Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2021		2022	
		Target	Realiasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan.	100 %	100 %	100 %	100 %

3.2 Eselon IV (Kassubag Umum Kepegawaian)

Meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan beberap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Lain :

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %		71,14%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.357.793,00	100	4.831.000,00	90,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.152.233,00	100	44.992.869,00	81,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.758.970,00	100	7.408.902,00	84,59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.345.000,00	100	135.894.748,00	99,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.733.180,00	60	21.274.704,00	44,57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.466.800,00	100	412.640.592,00	99,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60	24.320.877,00	40,53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	60	4.400.000,00	55,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.816.000,00	100	19.808.109,00	79,82

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, Persentase terkelolanya administrasi kegiatan umum dan kepegawaian.

Uraian selengkapny per indikator tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi kegiatan umum dan kepegawaian.	100%	100	100

Persentase terkelolanya administrasi kegiatan umum dan kepegawaian

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Kepegawaian dan Perencanaan, dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1). Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin aparatur pengawasan dalam hal berpakaian dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan dalam hal mentaati jam kerja masuk kantor dengan melakukan pamarafan absen baik absen masuk dan pulang kantor serta mentaati apel baik apel gabungan hari Senin dan gabungan hari tertentu juga apel setiap hari di kantor.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	100

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, pengelolaan keuangan, dan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi
- 2) Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.

3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan sarana kantor berupa meja kerja, kursi kerja untuk para auditor dan pejabat eselon IV dan Inspektur, laptop, komputer PC, lemari arsip, dan printer.

4) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana kantor.

Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.

3.3 Eselon IV (Kassubag Keuangan)

Meningkatkan kelancaran operasional administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan 2 Sub Kegiatan antara Lain :

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100		85,40
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.357.663.716,00	100	4.575.674.474,00	85,40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.357.663.716,00	100	4.575.674.474,00	85,40

4. Eselon III (Kabid Ketersediaan dan distribusi Pangan)

Data Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KET
Meningkatnya Ketersediaan	Persentase Ketersediaan	Ton	37.341,7 Ton (114%)	92.025,5	-30,9	Penurunan persentase surplus ketersediaan

Pangan masyarakat	pangan masyarakat					pangan dari tahun 2021 (berdasarkan ASEM)
-------------------	-------------------	--	--	--	--	---

Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk menjamin Ketersediaan Pangan dan Konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang pada tingkat Rumah Tangga, Daerah, Nasional untuk sepanjang waktu dan merata. Berdasarkan data Produksi pangan s.d tahun 2022 bahwa Tanah Laut berada pada posisi surplus pangan (beras) dengan target 114%. Dengan Jumlah penduduk 354.340 jiwa dengan kebutuhan pangan 37.341,7 ton/tahun sudah termasuk peningkatan kebutuhan pangan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional. Kondisi kebutuhan pangan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sangat tercukupi dengan nilai ketersediaan pangan yang cukup yaitu sebesar 92.025,5 ton bahkan surplus yang menjadi Cadangan Pangan Daerah sebesar 54.683,8 ton yang memang mengalami penurunan nilai persentase surplus sebesar 30,9 % dari tahun 2021.

Hal ini disebabkan karena serangan hama tungro pada beberapa Kecamatan Sentra Produksi diantaranya Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kurau juga disebabkan penurunan luas tanam padi sebesar 24,4 % dari tahun 2021. Sedangkan nilai ketersediaan masih tercukupi untuk Kabupaten Tanah Laut. Dimana Cadangan Pangan tersimpan dan terdistribusi di masyarakat dalam bentuk Stock / Distribusi Pasar lokal, Gudang Penggilingan Padi Masyarakat, 44 Lumbung Pangan Masyarakat dan 1 Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang terdiri dari Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.195.754.898,- realisasi keuangan sebesar Rp 2.982.983.893,- dengan persentase keuangan sebesar 93,34% dan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang terdiri dari Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dengan beberapa Sub Kegiatan dan Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan beberapa Sub Kegiatan. Untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp 79.815.074,- realisasi keuangan sebesar Rp 62.735.000,- dengan persentase keuangan sebesar 78,60% dan realisasi fisik sebesar 97,5%. Sedangkan untuk Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp 119.986.502,- realisasi keuangan sebesar 82.580.000 dengan persentase keuangan sebesar 68,82% dan realisasi fisik sebesar 100%.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan. Untuk pagu anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 51.918.551,- realisasi keuangan sebesar Rp 32.191.000 dengan persentase keuangan sebesar 62% dan realisasi fisik sebesar 100%.

PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	PAGU (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN		PAGU (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN	
			Rp	%			Rp	%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAAN PANGAN								
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.276.555.732	100	1.163.537.432	91,15	3.195.754.898	100	2.982.983.893	93,34
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.014.770.256	100	1.014.770.256	100	1.745.755.330	100	1.566.264.124	89,72
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	0	0	0	0	99.999.900	100	99.999.899	100
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	109.188.060	100	105.165.000	96,32	1.299.999.868	100	1.268.799.870	97,60
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	152.597.416	100	43.602.176	28,57	49.999.800	100	47.920.000	95,84

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	131.223.410	100	95.073.734	72,45	79.815.074	97,5	62.735.000	78,60
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	60.263.000	100	42.739.144	70,92	49.995.000	95	40.115.000	80,24
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	70.960.410	100	52.334.590	73,75	29.820.074	100	22.620.000	75,85
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	186.265.142	95	139.418.090	74,85	119.986.502	100	82.580.000	68,82
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80.250.000	100	65.850.000	82,06	119.986.502	100	82.580.000	68,82
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	106.015.142	90	73.568.090	69,39	0	0	0	0
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.378.876	100	133.081.868	100	51.918.551	100	32.191.000	62
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	202.378.876	100	133.081.868	100	51.918.551	100	32.191.000	62

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan / kerawanan pangan yang bersifat sementara ataupun keadaan darurat.

Saat ini Kabupaten Tanah Laut memiliki 1 (satu) buah Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang berada di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan pangan pemerintah yang merupakan sumber penyediaan pangan dalam menghadapi masalah pangan

seperti kekurangan pangan / kerawanan pangan akibat bencana baik alam maupun non alam, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat.

Untuk stok opname cadangan pangan pemerintah pada awal tahun 2022 adalah sejumlah 3130 kg yang mana terdapat selisih nilai (penyusutan) sebesar 43 kg yang disebabkan oleh serangan hama tikus dan masa simpan, suhu dan kelembaban gudang cadangan pangan pemerintah yang menyebabkan perubahan persentase kadar air pada gabah (kadar air meningkat).

Sedangkan pengadaan cadangan pangan pemerintah pada tahun ini adalah sebanyak 8,1 ton (8100 kg) dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II dan cadangan pangan pemerintah yang disalurkan sebesar 4105 kg dalam bentuk beras.

Pada akhir tahun 2022 sisa stok opname cadangan pangan pemerintah adalah sejumlah 4600 kg gabah dan 135 kg beras. Diharapkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang terdampak bencana.

Sedangkan untuk lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2022 berjumlah 44 buah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Ketersediaan selama 1 Tahun (kg)
					Gabah
1	Tani Makmur	Telaga	Pelaihari	Tanah Laut	17000
2	Mekar Sari I	Tajau Pecah	Batu Ampar	Tanah Laut	1000
3	Sari Mulia	Ujung	Bati-Bati	Tanah Laut	4500
4	Lestari Makmur	Sumber Makmur	Takisung	Tanah Laut	0
5	Rezeky Tanjung	Tanjung Dewa	Panyipatan	Tanah Laut	0
6	Unggul II	Karang Rejo	Jorong	Tanah Laut	2500
7	Mufakat	Panjaratan	Pelaihari	Tanah Laut	4000
8	Sarantang Saruntung	Kuringkit	Panyipatan	Tanah Laut	2100
9	Karya Mulya	Kayu Abang	Tambang Ulang	Tanah Laut	0
10	Maju Bersama	Handil Birayang Bawah	Bumi Makmur	Tanah Laut	1000
11	Kayuh Baimbai	Handil Babirik	Bumi Makmur	Tanah Laut	0
12	Tungkaran Bersatu	Tungkaran	Pelaihari	Tanah Laut	3000
13	Berkat Hemat	Raden	Kurau	Tanah Laut	369600
14	Rakat Mufakat	Handil Gayam	Bumi Makmur	Tanah Laut	1000
15	Harapan Baru	Guntung Besar	Pelaihari	Tanah Laut	0
16	Maju Bersama	Handil Suruk	Bumi Makmur	Tanah Laut	3000
17	Beruntung Tani*	Handil Maluka	Bumi Makmur	Tanah Laut	4500
18	Makmur	Bumi Harapan	Bumi Makmur	Tanah Laut	4600

19	Al-Hidayah*	Handil Birayang Atas	Bumi Makmur	Tanah Laut	4600
20	Bunga Mekar	Sarikandi	Kurau	Tanah Laut	1500
21	Sekawan	Sungai Bakar	Bajuin	Tanah Laut	1500
22	Sumber Makmur	Bajuin	Bajuin	Tanah Laut	1000
23	Gapura	Maluka Baulin	Kurau	Tanah Laut	4500
24	Alung	Tambak Karya	Kurau	Tanah Laut	0
25	Sidodadi	Benua Tengah	Takisung	Tanah Laut	4500
26	Lestari	Lokserapang	Pelaihari	Tanah Laut	24500
27	Berkat Permai	Angsau	Pelaihari	Tanah Laut	2000
28	Mitra Usaha	Pulau Sari	Tambang Ulang	Tanah Laut	15000
29	Usaha Mandiri	Batalang	Jorong	Tanah Laut	5500
30	Suka Maju	Tabanio	Takisung	Tanah Laut	12000
31	Jaka Suma	Telaga	Pelaihari	Tanah Laut	1000
32	Tunas Muda	Ambungan	Pelaihari	Tanah Laut	100
33	Serumpun	Gunung Raja	Tambang Ulang	Tanah Laut	5000
34	Mekar Sari	Handil Labuan Amas	Bumi Makmur	Tanah Laut	580000
35	Suka Maju	Ketapang	Bajuin	Tanah Laut	1500
36	Berkat Rakat Mufakat	Padang	Bati-Bati	Tanah Laut	500
37	Laras Banua	Banua Raya	Bati-Bati	Tanah Laut	500
38	Gapoktan Sido Makmur	Damit	Batu Ampar	Tanah Laut	6000
39	Ruhui Rahayu	Bawah Layung	Kurau	Tanah Laut	0
40	Berkat Mufakat	Kandangan Lama	Panyipatan	Tanah Laut	0
41	Bestari	Padang Luas	Kurau	Tanah Laut	0
42	Karya mandiri	Panggung	Pelaihari	Tanah Laut	0
43	Maju Bersama	Sungai pinang	Tambang Ulang	Tanah Laut	0
44	Karya Baru	Batakan	Panyipatan	Tanah Laut	0
			Jumlah		1.089.000

Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2022 memiliki 44 buah Lumbung Pangan Masyarakat dengan rincian 9 buah lumbung yang pembangunannya menggunakan dana APBD I dan 35 lumbung pembangunannya menggunakan dana DAK, APBD II dan Dana DID. Pembangunan lumbung terakhir yaitu TA 2022 sebanyak 6 (enam) buah dengan rincian 2 (dua) buah dana APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2 (dua) buah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 2 (dua) buah Dana Insentif Daerah (DID). Dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan bukan hanya infrastruktur saja tetapi ada pendukung kemandirian pangan berupa pengisian gabah 1 (satu) buah lumbung pangan yang dilaksanakan untuk stok pangan di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar sebesar 4 (empat) ton gabah.

5. Eselon III (Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan)

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui Konsumsi pangan setiap rumah tangga yang berbeda baik jumlah, mutu gizi dan keberagaman pangan adalah dengan menggunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

Melalui pendekatan PPH kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH. Skor PPH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ketahanan pangan di Indonesia. Skor maksimal yang dicapai 100 (skor ideal). Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.

Capaian indikator Skor PPH Ketersediaan tahun 2021 adalah 84,1 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 95 dengan tingkat capaian 88,52%. Namun pada Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan yakni Skor PPH adalah 90,7 dengan prosentase capaian sebesar 95,47%. Skor ini mengalami peningkatan sebesar 6,6 point jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 84,1. Realisasi tersebut baru mencapai 95,47% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 95.

Secara umum ada 9 kelompok pangan dalam PPH, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut, dimasukkan ke lain-lain. Jumlah kalori harian ideal yang dikonsumsi orang Indonesia dalam hal ini Kabupaten Tanah Laut Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah 2100 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kap/hari. Meskipun standar kecukupan lebih besar namun hasil data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Skor PPH kabupaten Tanah Laut yakni 90,7 lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 84,1.

Hasil dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tanah Laut ini meliputi Data-data Baseline, Konsumsi Hasil Pangan Hasil Susenas, hasil Analisis Pola Konsumsi, Kecukupan Gizi, skor PPH, Sasaran PPH, Proyeksi Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan wilayah berdasarkan pendekatan PPH sebagaimana terlampir

Berdasarkan Hasil Analisis Justifikasi Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan (Konsumsi Energi Dan Protein) dan skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan

Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat dari hasil perhitungan skor PPH pada Tabel dibawah ini.

Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Susenas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Gram/Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	1,294.9	54,6	58.3	27.7	39.1	48.6
2	Umbi-umbian	43,1	1.9	2.1	0.4	0.6	0.7
3	Pangan Hewani	366,2	16.3	17,4	31.9	45.0	55.9
4	Minyak dan Lemak	273	12.2	13.0	0.0	0.0	0.0
5	Buah/Biji Berminyak	10,9	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3
6	Kacang-kacangan	53,8	2.4	2.6	4.7	6.7	8.3
7	Gula	107,5	4.8	5.1	0.1	0.1	0.1
8	Sayur dan Buah	116,6	5.2	5.6	4.3	6.0	7.5
9	Lain-lain	48	2.1	2.3	1.6	2.2	2.8
	Total	2,244	100.0	106.9	70.8	100.0	124.2

Keterangan = *) **Angka Kecukupan Energi : 2100 Kkal/Kapita/Hari**
) **Angka Kecukupan Protein : 57 Gram/ Kapita/ Hari

Hasil Justifikasi Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dihasilkan adalah sebesar 2.224 Kkal per kapita per hari, hal ini menunjukan bahwa AKE telah melampaui angka standar AKE yang telah ditetapkan dalam analisis yaitu sebesar 2100 Kkal per kapita per hari, sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) juga menunjukan hasil sebesar 70,8 Gram perkapita per hari, dimana AKP juga telah melampaui standar yang telah ditetapkan sebesar 57 Gram per kapita per hari. Hal ini berarti konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Tanah Laut meskipun telah melampaui standar normative dan sudah memenuhi standar.

Dilihat dari Komposisi Angka Kecukupan Gizi nya, konsumsi padi-padian idealnya 50%, namun konsumsi di Tanah Laut tahun 2022 adalah 58,3 %, angka ini masih tinggi dan harus diturunkan sebesar 8,3 %. Kampanye untuk mengurangi konsumsi beras harus terus digalakkan dan ditingkatkan oleh pemerintah baik pusat maupun di daerah dengan menggandeng seluruh Stakeholder agar terjadi perubahan mindset konsumsi beras.

Adapun data hasil konsumsi aktual berdasarkan hasil Susenas jika dibandingkan dengan standar kecukupan gizi yang dianjurkan maka tingkat konsumsi energi dan skor PPH actual penduduk Kabupaten Tanah laut masih sebesar 90,7 %, belum mencapai target PPH yaitu 92 %. Dari capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan belum berhasilnya pencapaian target yang ingin dicapai. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena terdapat selisih yang cukup tinggi pada kelompok konsumsi pangan tertentu dibandingkan dengan standar kecukupan konsumsi, antara lain :

- Masih tingginya konsumsi beras
- Masih rendahnya konsumsi umbi umbian, sayur dan buah
- Pola konsumsi masyarakat yang sukar dirubah terutama dalam konsumsi sayur dan buah
- Ketersediaan pangan untuk kelompok pangan tertentu masih kurang, misalnya di wilayah perikanan sayur dan buah kurang tersedia.
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai target karena belum meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Dengan demikian masih diperlukan sosialisasi dan pembinaan yang intensif agar tingkat konsumsi pangan masyarakat mencapai skor PPH yang diharapkan.

Angka Kecukupan Energi dan Angka Kecukupan Protein. Namun kontribusi energi-energi dari 9 kelompok pangan belum menunjukkan keseimbangan, artinya konsumsi masyarakat Kabupaten Tanah Laut belum memenuhi kaidah konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tingkat Pencapaian Energi Menurut Kelompok Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Ideal Kkal/Kapita/Hari	SPM 90%
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)		
1	Padi-padian	1,294.9	54,6	58.3	1050	945.0
2	Umbi-umbian	43,1	1.9	2.1	126	113.4
3	Pangan Hewani	366,2	16.3	17,4	252	226.8
4	Minyak dan Lemak	273	12.2	13.0	210	189.0
5	Buah/Biji Berminyak	10,9	0.5	0.5	63	56.7
6	Kacang-kacangan	53,8	2.4	2.6	105	94.5
7	Gula	107,5	4.8	5.1	105	94.5
8	Sayur dan Buah	116,6	5.2	5.6	126	113.4
9	Lain-lain	48	2.1	2.3	63	56.7
	Total	2,244	100.0	106.9	2.100	1,890.0

*Keterangan = Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2100 Kkal/Kapita/Hari
SPM : Standar Pelayanan Minimum*

Berdasarkan data Tahun 2022 diketahui ada peningkatan Tingkat Konsumsi Energi yakni 2.244 Kkal/kapita jika dibandingkan tahun 2021 yakni 2.215 Kkal/kapita. Hasil Data Tahun 2022 diketahui bahwa dari 9 (sembilan) kelompok pangan asupan energi yang paling tinggi disumbangkan oleh kelompok padi-padian yaitu sebesar 1.224,9 Kkal per kapita per hari kemudian disusul dari pangan hewani sebesar 366,2 Kkal perkapita per hari kemudian minyak dan lemak sebesar 273 kkal perkapita per hari, gula sebesar 107,5 kkal/kap/hari, 4 jenis ini semuanya sudah melebihi standar/ nilai idealnya utk asupan perharinya. Sayur dan buah, kacang-kacangan sedangkan umbi-umbian masih sedikit sekali dan yang paling kecil adalah buah / biji berminyak hanya sekitar 10,9 Kkal perkapita per hari sedangkan idelanya konsumsi adalah buah / biji berminyak hanya sekitar 63 Kkal perkapita per hari

Bila dilihat dari pencapaian energi menurut kelompok pangan. Maka tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Tanah Laut telah mencapai tingkat laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2022 22

konsumsi energy yang lebih dari ideal beberapa kelompok pangan. Namun masih terdapat ada beberapa kelompok pangan yang lebih kecil nilainya dari batas ideal. Standar normative konsumsi padi-padian perkapita per hari adalah 1.050 Kkal sementara masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi jenis padi-padian hingga 1.224,9 Kkal. Konsumsi padi-padian idealnya adalah 54,5% sedangkan di Tanah Laut sebesar 58,3 %. Sedangkan standar normative konsumsi pangan sejenis umbi-umbian per kapita per hari adalah 126 Kkal, sementara masyarakat Kabupaten Tanah Laut mengkonsumsi pangan jenis ini baru mencapai 40,1 kkal per kapita per hari.

Pangan hewani mestinya dikonsumsi 252 Kkal per kapita per hari, sementara masyarakat Tanah Laut telah dapat mengkonsumsi pangan hewani sebanyak 366,2 Kkal. Minyak dan Lemak mestinya dikonsumsi 210 kkal per kapita perhari, masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi lemak hingga 273 Kkal. Buah/biji berminyak mesti dikonsumsi 63 Kkal perkapita per hari, namun masyarakat Tanah Laut hanya 10,9 Kkal per kapita per hari.

Kacang-kacangan mesti dikonsumsi 105 Kkal per kapita per hari, namun warga Tanah Laut hanya mengkonsumsi 53,8 Kkal. Demikian pun halnya Gula mesti dikonsumsi hingga 105 Kkal per kapita per hari. Namun dikonsumsi sebanyak 107,5 Kkal.

Sayur dan Buah-buahan mesti dikonsumsi 126 Kkal per kapita per hari faktanya yang dikonsumsi 116,6 Kkal perkapita per hari. Sedangkan bumbu-bumbuan dan minuman mesti dikonsumsi 63 Kkal perkapita per hari, sayangnya masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi bumbu-bumbuan dan minuman sebesar 48 Kkal Per kapita per hari.

Secara Keseluruhan Pola konsumsi pangan Kabupaten Tanah Laut masih belum optimal dikarenakan :

1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras
2. Masih rendahnya konsumsi pangan buah/biji berminyak, umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayur dan buah
3. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal
4. Diperlukan upaya untuk menganeekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.

5. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (nutrition sensitive production system).

Apabila konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah tinggi skor PPH Konsumsi akan meningkat karena bobot dari kelompok pangan sayur dan buah dalam skor PPH konsumsi tinggi. Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye gerakan mengurangi konsumsi beras yang dilaksanakan secara terus menerus dan masif di seluruh Kabupaten Tanah Laut serta dukungan dari seluruh stakeholder yang ada agar terjadi perubahan mindset konsumsi beras, dengan bahan pengganti beras bersumber bahan pangan local, seperti jagung, umbi-umbian, atau sagu.
2. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH konsumsi yang ideal agar hidup menjadi sehat, aktif dan produktif.
3. Meningkatkan pembinaan pada masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui sosialisasi di kelompok wanita tani (KWT) dengan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), PKK dan posyandu.
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan dengan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sehingga masyarakat dapat menyediakan pangan dan gizi secara mandiri tidak harus pergi ke pasar atau warung yang jaraknya cukup jauh untuk dijangkau masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan di pegunungan jauh dari penduduk, serta akses transportasi yang sulit.

Setelah dilakukan penilaian terhadap kualitas konsumsi masyarakat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH) dengan rentang skor 0 hingga 100, dengan asumsi semakin tinggi skor PPH menunjukkan bahwa mutu atau kualitas pangan yang dikonsumsi semakin beragam, bergizi dan seimbang. Dari hasil perhitungan skor pola pangan harapan (PPH) mutu konsumsi masyarakat Tanah Laut mendapat skor PPH pada Tahun 2021 sebesar 84,1. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2022 Skor PPH mencapai 90,7 lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

**Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk
Berdasarkan Data Susenas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	305.7	1,225	54,6	58.3	0.5	27.3	29.2	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	37.6	43	1.9	2.1	0.5	1.0	1.0	2.5	1.0
3	Pangan Hewani	177.0	366	16.3	17,4	2.0	32.6	34.9	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	30.3	273	12.2	13.0	0.5	6.1	6.5	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	1.9	11	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	1.0	0.3
6	Kacang-kacangan	21.4	54	2.4	2.6	2.0	4.8	5.1	10.0	5.1
7	Gula	29.3	107	4.8	5.1	0.5	2.4	2.6	2.5	2.5
8	Sayur dan Buah	242.0	117	5.2	5.6	5.0	26.0	27.8	30.0	27.8
9	Lain-lain	77.5	48	2.1	2.3	-	-	-	-	-
	Total		2,244	100.0	106.9		100.4	107.3	100.0	90.7

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi : 2100 Kkal/Kapita/Hari

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kualitas konsumsi pangan masyarakat Tanah Laut selama 5 tahun terakhir berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH) maka pada tahun 2022 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya , hal ini dapat dilihat pada Tabel Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor PPH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018– 2022.

**Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Energi Justifikasi	Skor PPH Justifikasi
2018	2.058	86.6
2019	2.211	83.3
2020	2.130	82.8
2021	2.215	84.1
2022	2.244	90.7

Dari tabel di atas dapat dilihat skor PPH tahun 2018 senilai 86.6 dan tahun 2019 skor PPH turun menjadi 83,3. Pada tahun 2020 skor PPH kembali mengalami penurunan menjadi 82,8. sedangkan tahun 2021 skor PPH naik lagi menjadi 84,1. Dilihat dari komposisi Angka Kecukupan Gizinya, Konsumsi Dalam RPJMN 2020 - 2024, indikator skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan. Ada beberapa alternatif yang mungkin menyebabkan skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Tanah Laut mengalami penurunan, walaupun tahun 2021 ini mengalami kenaikan dari tahun 2020, namun masih belum sesuai dengan skor ideal yang diharapkan, hal tersebut disebabkan antara lain jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan rumah tangga seperti kita ketahui bahwa dalam 2 tahun terakhir ini kasus covid-19 tinggi di Kabupaten Tanah Laut dan hal ini sangat berimbas kepada pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap, faktor lainnya adalah pendidikan, dan pantangan makanan.

Selain hal tersebut upaya untuk mencapai target skor PPH, Kabupaten Tanah Laut melalui program dan kegiatan melakukan antara lain:

- 1) Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yaitu sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan secara intensif untuk di manfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat dengan pelaku utama

kelompok P2L yaitu kelompok wanita sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan

- 2) Dukungan Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemara biologis, kimia dan fisik pada pangan segar melalui pengawasan dan pembinaan pangan yang dilengkapi dengan perangkat perundang-undangan dibidang mutu dan keamanan pangan
- 3) Dukungan peta ketahanan pangan dan kerentan pangan untuk mengetahui titik pemantapan ketersediaan pangan beragam, bergizi dan berimbang, dan pangan rawan beragam, bergizi dan berimbang,
- 4) Dukungan informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman gizi berimbang dan keamanannya
- 5) Dukungan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan untuk mengetahui ketersediaan dan ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu
- 6) Dukungan ketersediaan informasi kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah pengamatan terhadap kondisi ketersediaan informasi distribusi, dan harga berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, daya beli masyarakat dan akses pangan beragam, bergizi dan berimbang di daerah.
- 7) Penguatan kelembagaan Keamanan Pangan segar daerah Kab/Kota berupa pembinaan, pemantauan serta pengawasan keamanan pangan pada Tahun 2022 dengan memberikan informasi/edukasi kepada masyarakat terkait pangan yang bebas dari zat-zat yang berbahaya serta tidak bertentangan dengan agama, adat dan budaya sehingga aman untuk dikonsumsi.
- 8) Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota berupa pembinaan dan pemantauan keamanan pangan dengan kegiatan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan sekaligus uji ampel pangan segar tersebut.

Adapun dukungan kegiatan antara lain :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASI	
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Program Konsumsi dan Keamanan Pangan	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per tahun	15.000.000,-	50,8	80
		Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	158.926.124,-	80	87
		Koordinasi dan singkronisasi pemnataan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun	77.354.915,-	53,4	59
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar	41.249.595,-	84,12	100
		Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Mutu pangan segar asal tumbuhan Kab/Kota	42.030.263,-	83,92	100

6. Eselon III (Kabid Pengembangan Usaha Perikanan)

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	%	2,5	0,97

	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau	%	2,5	0,97
--	--	---	-----	------

Indikator Kinerja Persentase Produksi Perikanan Budidaya air tawar. Target Produksi Budidaya Air Tawar Tahun 2021 adalah 331,93 Ton, Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Air Tawar sebesar 0,97 % dari target, jumlah produksi perikanan budidaya air tawar mencapai 341,31 ton, diperoleh dari produksi kolam, keramba dan jaring apung. Pada Tahun 2021 Jumlah Produksi budidaya air tawar sebesar 331,93 Ton, Persentase Peningkatan Produksi Budidaya air Tawar Tahun 2022 terhadap tahun 2021 sebesar 0,97 %, tetapi masih dibawah target produksi sebesar 2,5 %

Peningkatan produksi budidaya air tawar tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 terutama komoditas ikan lele dan nila dikarenakan meningkatnya budidaya ikan lele kolam terpal serta budidaya ikan nila di kolam tanah dan jaring apung.

Kegiatan pembenihan di kabupaten tanah laut baru terdata 14 UPR. Kegiatan pembenihan berada di kecamatan Batu Ampar, Tambang Ulang, Bati-Bati, dan Pelaihari dengan komoditasnya adalah ikan lele

Tabel Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Tahun	Perikanan Budiaya Air TAwAr (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	223,70		
2018	238,43	14,73	6,30
2019	325,65	87,22	36,58
2020	331,93	6,28	1,93
2021	341,31	9,38	0,97

Adapun kendala perikanan budidaya air tawar yang ada adalah sebagai berikut;

No.	KENDALA	SOLUSI
1	Permodalan	Kemitraan dan perbankan

2	Pemasaran	membentuk koperasi, kemitraan, promosi
3	penguasaan teknik budidaya	kepesertaan pelatihan/diklat teknis,
		pembinaan dan kunjungan dari instansi terkait dan penyuluh
		uji kompetensi pembudidaya
4	pakan	harga pakan yang cenderung mahal bisa diatasi dengan membuat pakan sendiri dengan bahan/alat yang ada di sekitar/lingkungan.
		Menggunakan pakan alternatif/tambahan
5	bibit unggul	disarankan untuk membeli bibit ikan yang bersertifikasi
6	pokdakan belum berbadan hukum	disarankan kepada kelompok membuat badan hukum agar bisa mengakses bantuan baik dari pemerintah pusat, propinsi maupun daerah
		fasilitasi kelompok untuk membuat dokumen berbadan hukum baik dari pemerintah daerah atau dari pihak swasta/perusahaan di sekitar
		swadaya kelompok
7	database/listing RTP perikanan budidaya	kegiatan pembuatan database RTP Perikanan budidaya di fasilitasi oleh pemerintah daerah tahun anggaran 2019.
		Tersusunnya up dating data RTP dan Produksi Budidaya Perikanan kabupaten tanah laut yang lebih signifikan
8	peningkatan mutu dan kualitas produksi perikanan budidaya	pendampingan dan audit CBIB untuk kegiatan pembesaran dan CPIB untuk kegiatan pembenihan

Peningkatan produksi perikanan budiday air payau pada tahun 2022 adalah sebesar 0,97 % yang berada pada angka 1.045 ton dibanding pada tahun 2021 yang hanya berada pada angka 1020 ton dengan komoditas budidaya berupa udang windu, bandeng dll. Peningkatan produksi pada budidaya air payau pada tahun 2022 di banding tahun 2021 karena adanya peningkatan kegiatan di sektor perikanan budidaya air payau. Produksi tambak di kabupaten tanah laut berpotensi meningkat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan tambak dan rehab infrastruktur tambak.

Tabel produksi perikanan budidaya air payau

Tahun	Perikanan Budidaya Air Payau (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	933,76		
2018	963,01	29,25	3,13
2019	1004,,33	41,32	4,3
2020	1020,22	15,89	1,58
2021	1045,47	25,25	0,97

Keluaran kegiatan dalam rangka mendukung capaian program

No.	Keluaran	Awal	Perubahan I (Rasionalisasi)	Perubahan II
1	Bimbingan teknis pembudidaya ikan	✓	x	x
2	Pendampingan Cara Budidaya Ikan Yang Baik dan Benar	✓	x	x
3	Fasilitasi Kemitraan	✓	x	x
4	Updating data produksi perikanan budidaya	✓	✓	✓
5	Pembinaan dan pengembangan desa produksi perikanan budidaya	✓	x	x
6	Pengadaan alat uji kualitas air	x	x	✓
7	Fasilitasi pemeriksaan sampel penyakit ikan	x	x	✓
8	Buku saku pembudidaya ikan	x	x	✓

Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan

Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Olahan hasil Perikanan tahun 2022 realisasi sebesar 1757 ton dari target produksi olahan hasil perikanan sebesar 1647 Ton, persentase tersebut dibawah dengan target produksi sebesar 2.5 % dan hasil perolehan tahun 2022 sebesar 0,94 %, jadi menurun sebesar 1,06 % dari target produksi olahan sebesar 2.5 %.

Hasil tersebut didapat dari meningkatnya olahan ikan kering, kerupuk, amplang, undang rebon (Papai), terasi dan udang beku serta olahan lainnya.

Nama produksi	Target	Perolehan	Persentase
Produksi olahan hasil perikanan	1647 ton	1757 ton	0,94 %

Tabel Produksi Olahan Perikanan

Tahun	Produksi Olahan Perikanan (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	1096		
2018	1199	103	9,40
2019	1360	161	13,40

2020	1647	287	21.11
2021	1757	110	0,94

Kegiatan yang mendukung dalam kegiatan tersebut antara lain ;

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	28.884.120,00	100	25.680.600,00	88,91
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.230.076,00	100	47.949.676,00	82,35
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.736.500,00	100	211.212.340,00	78,01
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.572.500,00	100	22.102.300,00	86,43
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha	150.618.520,00	100	124.055.829,00	82,36

Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
--	--	--	--	--

7. Eselon III (Kabid Perikanan Tangkap)

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Produksi Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap perairan laut	Ton	58.126	60.251
	persentase produksi perikanan tangkap perairan umum	Ton	4.486	4.780

Indikator Kinerja jumlah produksi perikanan tangkap perairan laut Target produksi tahun 2022 sebesar 58.126 Ton, terealisasi 60.251 Ton sehingga ada peningkatan produksi perikanan tangkap perairan laut sebesar 3.25 Ton (3,65 %), tetapi didalam target peningkatan kinerja persentasi produksi perikanan tangkap perairan laut sebesar 2.5 %,

Tabel Produksi Perikanan Tangkap Perairan Laut

Tahun	Perikanan Tangkap perairan laut (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	52824		
2018	53324	500	0.94
2019	55641	2317	4,35
2020	56886	1245	2,24
2021	59964	3078	5,13
2022	60.251	2.125	3,65

Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Perairan umum. target produksi tahun 2022 sebesar 4.486 ton, terealisasi sebesar 4780 ton, sehingga adanya peningkatan produksi perikanan umum sebesar 294 Ton (6,55 %). didalam target peningkatan kinerja persentase produksi perikanan tangkap perairan umum sebesar 2,5 %,

Tabel Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum

Tahun	Perikanan Tangkap Perairan umum (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	3964		
2018	3977	13	0,33
2019	4333	356	8,95
2020	4339,1	6,1	0,14
2021	4581,1	242	5,28

Faktor yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap yaitu:

1. Faktor cuaca ekstrim yang melanda daerah Kalimantan Selatan
2. Faktor sulitnya mendapatkan BBM nelayan bersubsidi
3. Sarana dan Prasana, khususnya alat tangkap yang tidak layak
4. Belum addanya Dokumen Kapal dan Dokumen perijinan Kapal Perikanan.
5. Keberadaan SDM penyuluh yang tidak merata pada kecamatan Pesisir
6. Kualitas SDM nelayan yang masih bersifat Tradisional, masih orientasinya untuk kebutuhan rumah tangga
7. Faktor Elegal fishing yang merusak ekosistem Sumberdaya Perikanan
8. Kurangnya informasi akses permodalan dari perbankan

Adapun dukungan kegiatan tahun anggaran 2022 antara lain

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASI	
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Perikanan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumberdaya Perikanan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	99.898.026	13,07%	22,28%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.017.634.223	95,53%	97,07%
	Pengelolaan penangkapan ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk,	Penyediaan Data Dan Informasi Sumberdaya Ikan	48.675.000	74,70%	100%

	Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				
--	--	--	--	--	--

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2022

- Belanja Operasi

Jumlah belanja operasi ini dipergunakan untuk membiayai seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Realisasi Belanja Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022 anata Lain :

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.884.618,00	100	825.618,00	88,01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	100	3.970.000,00	99,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.357.663.716,00	100	4.575.674.474,00	85,40
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.357.793,00	100	4.831.000,00	90,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.152.233,00	100	44.992.869,00	81,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.758.970,00	100	7.408.902,00	84,59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.345.000,00	100	135.894.748,00	99,67

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.733.180,00	60	21.274.704,00	44,57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.466.800,00	100	412.640.592,00	99,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60	24.320.877,00	40,53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	60	4.400.000,00	55,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.816.000,00	100	19.808.109,00	79,82
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.745.755.330,00	100	1.566.264.124,00	89,72
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	99.999.900	100	99.999.899	100
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.299.999.868,00	100	1.268.799.870	97,60
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	49.999.800,00	100	47.920.000	95,84
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				

Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	49.995.000,00	95	40.115.000,00	80,24
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.820.074,00	100	22.620.000,00	75,85
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	119.986.502,00	100	82.580.000,00	68,82
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	15.000.000,00	80	7.620.612,00	50,80
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.635.427,00	87	120.510.044,00	80,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	77.354.915,00	59	41.320.000,00	53,42
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	51.918.551,00	100	32.191.000,00	62,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41.249.595,00	100	34.696.887,00	84,11
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.030.263,00	100	35.271.540,00	83,92
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	48.675.000,00	100	36.360.000,00	74,70
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.017.634.223,00	97	1.927.408.082,00	95,53
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	29.866.610,00	100	25.587.800,00	85,67
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.901.530,00	100	17.870.600,00	71,77
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	273.538.547,00	100	241.638.140,00	88,34
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	99.898.026,00	25	86.843.026,00	13,07

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.999.003,00	100	24.135.300,00	96,54
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	107.984.233,00	100	100.996.468,00	93,53
	12.530.421.310	88,57	11.048.226.541	88,17

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka perhitungan LAKIP dilakukan dengan menggunakan formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), formulir Penetapan Kinerja (PK) dan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dimana didalam penyusunan LAKIP dengan sistem ini cara pengukuran kinerja diarahkan untuk mengukur kegiatan-kegiatan dalam pencapaian sasaran yang terkait, pengukuran kinerja. Ada beberapa hal yang perlu disikapi terhadap pencapaian target kinerja indikator dalam pencapaian strategis diantaranya adalah :

Secara global hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan hasil analisis capaian kinerja maka pada tahun 2022 ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 88,57%. Hasil ini sebagian belum mencapai target sasaran yang maksimal pada tahun bersangkutan yang telah ditetapkan pada DPA, meskipun masih dijumpai adanya beberapa kendala dan kelemahan yang masih memerlukan pemikiran, solusi dan peningkatan serta perbaikan atas sajian Lapkin tersebut dimasa yang akan datang.

Adapun hasil (out-come) kegiatan tahun anggaran 2022, sesuai sasaran target yang tertuang Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu adanya kesimpulan analisa atas capaian kinerja tersebut dalam batasan target yang kan dicapai oleh SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tersebut dengan memperhatikan hal hal atau faktor-faktor kendala yang harus dicermati diantaranya adalah :

1. Kesesuaian Renstra tahun 2018 – 2023 yang di breakdown lima tahun ke depan dari tahun ketahun, untuk target terhadap capaian kinerja perlu dievaluasi terhadap besaran kapasitas baik berupa angka-angka ataupun ukuran, volume, produk harus dilakukan pencermatan kembali.
2. Ukuran secara produksi hasil perikanan secara umum sesuai hasil IKU yang telah ditampilkan pada Bab III tersebut telah menunjukkan adanya penurunan

produksi perikanan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, iklim yang tidak kondusif, pluktuasi harga pasar yang tidak menentu, kondisi kapal yang sudah semakin tua, adanya regulasi yang masih membatasi hak-hak para nelayan dalam menangkap ikan termasuk alat tangkap yang dipergunakan.

3. Untuk kegiatan penunjang lainnya berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2022 telah berjalan secara optimal dengan persentase keuangan dan fisik cukup baik, hanya saja ada beberapa faktor kendala pula yang harus disikapi pada saat itu berupa adanya regulasi peraturan dari permendagri seperti hal tersebut diatas terkait keberadaan bantuan hibah pada masyarakat yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Tanah Laut. Terbatas.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi peningkatan kinerja yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan rumusan dalam pencapaian target dan sasaran atas pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan memanfaatkan stakeholder yang terkait dalam peningkatan komoditi sektor produksi perikanan dan pendapatan yang selaras.
2. Pemanfaatan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu adanya pencermatan dan azas manfaat serta tingkat kebutuhan riil yang benar-benar dapat memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.
3. Selektivitas terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus benar-benar konsisten untuk dilaksanakan dan penuh tanggungjawab dalam pencapaian target dan sasaran kinerja.
4. Pencermatan terhadap skala prioritas terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi modal utama dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaan sesuai tugas dan fungsi.

Demikian laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, sebagai bahan informasi gambaran kinerja
laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2022 2

dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam pencapaian target indikator dan sasaran strategis.

Pelaihari, 2023
Kepala Dinas



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
NIP.19710224 199702 1 003

Lampiran ;

1. IKU
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 bertanda tangan
3. Cascading/Pohon Kinerja
4. Capaian Kinerja Renstra (2018-2023)
5. Matrik Keselarasan